



Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Serang (Studi Pada SMKN 3 Kota Serang)

Eli Apud Saepudin^{1*}

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Email: eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
<p>Submitted: 10-01-2023 Revised: 15-01-2024 Published: 31-01-2024</p> <p>Keywords: Policy Implementation Independent Curriculum Vocational School</p>	<p><i>The successful implementation of the independent curriculum policy must be supported by good school leadership, teacher creativity, student activity, socialization of the Merdeka curriculum, learning facilities and resources, a conducive academic environment, and the participation of school residents. Factors Affecting Outside Policies in the Implementation of the Independent Curriculum Policy at SMK 3 Serang City School are Suggestions for socio-economic conditions The implementation of the independent curriculum policy at SMK 3 Serang City School must be supported by complete infrastructure. Not only relying on BOS alone for the successful implementation of the independent curriculum policy but there must be monitoring from the provincial government, the education office. This research uses descriptive qualitative methods with observation and interview methods.</i></p>

Abstrak

Dana Bantuan Operasional (BOS), tidak hanya menjadi kunci sukses dalam bidang tersebut Keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum merdeka harus didukung oleh kepemimpinan sekolah yang baik, kreativitas guru, aktivitas siswa, kurikulum Merdeka sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan akademik kondusif, dan partisipasi warga sekolah. Faktor yang Mempengaruhi Luar Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum merdeka Sekolah SMK 3 Kota Serang merupakan Saran kondisi sosial ekonomi Implementasi Kebijakan Kurikulum merdeka di Sekolah SMK 3 Kota Serang harus didukung infrastruktur yang lengkap. Tidak hanya mengandalkan BOS sajadana untuk keberhasilan implementasi Kebijakan Kurikulum merdeka tetapi harus ada pemantauan dari Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Sekolah Kejuruan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara Pemamparan pada latar belakang dapat diperkuat denan kajian literatur atau hasil penelitian terkait yang disitasi secara langsung sesuai dengan topik yang relevan dengan penelitian yang akan anda lakukan. Dalam setiap pragraf dapat memasukkan setiap sitasi untuk mendukung informasi primer yang merujuk pada setiap penelitian terkait (Jojoer et al., 2022).

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jika dihitung Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 (sebelas) macam, antara lain: Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran : Dirinci Dalam Rencana Pelajaran Terurai, 1964 Rencana

Pendidikan Dasar, Tahun 1968 Kurikulum Sekolah Dasar, tahun 1974 Kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), Tahun 1975 Kurikulum Sekolah Dasar, Tahun 1984 : Desain Kurikulum 1984. Tahun 1994 : Desain Kurikulum 1994, Tahun 1997: Revisi Kurikulum 1994, Tahun . 2004 : Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Tahun 2006: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 dan saat ini menjadi kurikulum merdeka (Rambung et al., 2023). Masalah yang diteliti 1. Lemahnya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap implementasi Kurikulum 2. Rendahnya Karakter dan sikap guru sebagai implementor kurikulum merdeka. 3. Rendahnya Profesionalitas guru dalam implementasi kurikulum merdeka. 4. Kurangnya Sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum merdeka. 5. Kurangnya Fasilitas dan sumber belajar yang memadai dalam kurikulum merdeka (Noviyanti et al., 2022).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang di gunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan dan melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk (1) Memulihkan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak siswa kehilangan waktu belajar. Kurikulum Merdeka dirancang untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan pembelajaran mereka dan mencapai potensi penuh mereka; (2) Memberikan kebebasan belajar kepada siswa. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang mereka minati dan pelajari sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa; (3) Mengembangkan karakter siswa. Kurikulum Merdeka tidak hanya fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter siswa (Saepudin et al., 2023). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkebinekaan global, dan berwawasan kebangsaan dan (4) Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan pendidikan yang lebih berkualitas dan berpusat pada siswa.

Berikut adalah beberapa ciri utama Kurikulum Merdeka: Fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, Memberikan kebebasan belajar kepada siswa, Mengembangkan karakter siswa, Menyederhanakan kurikulum, Memberikan keleluasaan kepada guru, Kurikulum Merdeka masih dalam tahap implementasi dan terus diperbaiki (Kholiq & Ulfa, 2024). Penelitian ini menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yakni (1) Karakteristik Masalah; (2) Daya Dukung Kebijakan dan (3) Daya Dukung Di Luar Kebijakan.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public value*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam (Rahayu et al., 2022). Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk (1) mewujudkan nilai-nilai yang di idealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan ; (2) Memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat misalnya : masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan, dan pelayanan publik yang buruk; (3) Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor; (4) Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya; pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan (Wakia, 2021).

Karakteristik Masalah Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajarannya seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Keberagaman perilaku implementor kebijakan kurikulum merdeka Pendidikan, baik formal maupun nonformal dan informal, merupakan media yang tepat untuk mewariskan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Melalui Kurikulum merdeka, lembaga pendidikan berkesempatan mengembangkan muatan lokal untuk kemudian diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu. Materi yang dikembangkan tentu berdasarkan karakteristik wilayah dimana peserta didik bertempat tinggal, karena sejatinya setiap wilayah memiliki keragaman budaya. Melalui muatan lokal, peserta didik diharapkan dapat mengenal dan lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum merdeka.

Daya Dukung Kebijakan Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi tujuan dan mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan lingkup belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang cukup, manajemen pendidikan yang dilakukan secara profesional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Standar nasional pendidikan yang tepat untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan sebagai acuan norma dalam pendidikan. "Kebijakan Kurikulum merdeka yang sebelumnya Kurikulum 2006 KTSP berawal dari itu UU 23 Tahun 2014 undang-undang terkait hal tersebut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menengah, terkait sikap dan tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kurikulum inikan Statis dan Juga Dinamis artinya menyesuaikan dengan kebutuhan jaman. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum merdeka kita akan menghasilkan insan indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi.

Dalam hal ini, pengembangan kurikulum di fokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat di demonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang di pelajarnya secara kontekstual. Kurikulum merdeka memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan di jadikan sebagai standar hasil penilaian belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu. Sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya”. Hasil diskusi dengan Kasi Kurikulum SMK Provinsi Banten dapat di analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum merdeka Statis dan Juga Dinamis artinya menyesuaikan dengan kebutuhan jaman, kejelasan dan tujuan yang akan di capai dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah memang harus di tunjang dengan kesiapan semua aspek karena kurikulum ini bersifat statis dan juga dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan jaman artinya tidak membuat bingung kepala sekolah, guru bahkan siswa itu sendiri.

Daya Dukung Diluar Kebijakan Kondisi sosio ekonomi saat ini sangat baik, baik di SMKN 3 Kota Serang sehingga dapat menerima perubahan kurikulum agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. “Sekurang-kurangnya ada tiga kemungkinan dimana perbedaan-perbedaan kondisi semacam itu dapat mempengaruhi efektivitas dukungan politik terhadap *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana, serta pada gilirannya terhadap pencapaian tujuan-tujuan itu sendiri. Pertama, perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomi dapat memengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan di tanggulasi oleh suatu undang-undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya. Kalau pada suatu waktu tertentu ternyata masih ada masalah-masalah sosial lainnya dianggap jauh lebih penting –lebih serius, lebih memerlukan perhatian maka kemungkinan dukungan politik untuk mengalokasikan sumber-sumber langka, seperti dana, tenaga, keahlian, material, dan sebagainya, demi tercapainya tujuan undang-undang akan menurun secara drastis. Kedua, keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 mungkin akan sulit dicapai, mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis setempat dan tingkat kesulitan masalah yang sering dihadapi. Perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis tersebut akan menimbulkan desakan-desakan untuk membuat aturan-aturan yang luwes dan yang memberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi tertentu pada satuan-satuan organisasi lokal (badan-badan pelaksana daerah) (Leny, 2022).

Pertama, perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomi dapat memengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan di tanggulasi oleh suatu undang-undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya. Kalau pada suatu waktu tertentu ternyata masih ada masalah-masalah sosial lainnya dianggap jauh lebih penting –lebih serius, lebih memerlukan perhatian maka kemungkinan dukungan politik untuk mengalokasikan sumber-sumber langka, seperti dana, tenaga, keahlian, material, dan sebagainya, demi tercapainya tujuan undang-undang akan menurun secara drastis (Susilo et al., 2022).

Kedua, keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum merdeka mungkin akan sulit dicapai, mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis setempat dan tingkat kesulitan masalah yang sering dihadapi (Pendidikan & Teknologi, 2023).

Ketiga, dukungan terhadap peraturan yang bermaksud untuk melindungi lingkungan, konsumen, atau keselamatan kerja tampaknya berkorelasi dengan sumber-sumber keuangan dari kelompok-kelompok sasaran dan kelompok-kelompok lain yang memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Semakin beraneka ragam kehidupan ekonomi dan semakin makmur kelompok-kelompok sasaran tersebut, semakin besar peluang efektivitas implementasi dari undang-undang yang bermaksud mengenakan biaya-biaya produktif pada mereka (Pancasila, n.d.).

Dari uraian-uraian di atas yang telah di paparkan di atas, bahwa kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi merupakan beberapa variabel eksternal kunci yang dapat memengaruhi *output-output* kebijakan badan-badan pelaksana, dan yang pada akhirnya memengaruhi pencapaian tujuan undang-undang. Kondisi-kondisi tersebut terjalin dengan implementasi melalui perubahan-perubahan dalam kelompok-kelompok kepentingan dan dukungan publik terhadap tujuan-tujuan tersebut, atau melalui badan-badan legislatif dan eksekutif atasan dari badan-badan pelaksana. Para pejabat pelaksana juga dapat memberikan respons positif terhadap perubahan-perubahan tertentu pada kondisi-kondisi lingkungan, khususnya jika mereka menganggap bahwa perubahan tersebut mendukung program-program atau nilai-nilai mereka (Pancasila, n.d.).

Komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan kurikulum merdeka seharusnya dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional secara bertahap, namun dalam kenyataannya seringkali menghadapi berbagai masalah dan tantangan, sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mengalami kegagalan (Umam et al., 2022). Oleh karena itu setiap perubahan kurikulum mestinya memperlihatkan kondisi-kondisi yang di alami dalam implementasi kurikulum sebelumnya, tidak bisa serampangan juga tidak boleh terlalu di paksakan. Kesan dipaksakan sepertinya dimiliki oleh kurikulum merdeka, kurikulum ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, terjadi pro dan kontra, bahkan kurang dari satu bulan dari waktu yang di rencanakan untuk implementasi, kurikulum ini belum mendapatkan restu dari (DPR). Meskipun demikian Mendikbud Nadiem Anwar Maarim sangat optimis dengan kurikulum ini, bahkan dengan semangat yang menggebu-gebu mengungkapkan: "Pokoknya Kurikulum merdeka Harus Jalan". Ungkap tersebut mengundang arti bahwa apapun yang terjadi, perubahan kurikulum ini tidak boleh di tunda-tunda lagi. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.

Kurikulum 2013 merupakan proyek yang anggarannya mencapai angka hampir 2,5 triliun (Noviyanti et al., 2022). Ini merupakan proyek nasional, bahkan bisa dibilang proyek raksasa, karena melibatkan banyak orang dan lembaga. Konon, untuk membiayai implementasi kurikulum merdeka ini rencananya dimulai dengan pelatihan guru, dengan anggaran lebih dari satu triliun (Devi et al., 2024). Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran tersebut tidak dikorupsi ? Siapa bertanggung jawab jika terjadi kebocoran, tercecer, atau bahkan salah sasaran. Kunci sukses dari implementasi kebijakan kurikulum merdeka adalah menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. (1, 2, 3, 2022) Dengan kreativitas, anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. (Pembangunan, 2012) Meskipun demikian keberhasilan kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif dan

inovatif, serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah (Rahayu et al., 2022).

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka Sekolah Kejuruan (SMK) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk (1) Mempersiapkan siswa SMK untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja Kurikulum Merdeka SMK dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan fokus pada pembelajaran praktik dan proyek-proyek industry; (2) Memberikan kebebasan belajar kepada siswa Kurikulum Merdeka SMK memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang mereka minati dan pelajari sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa; (3) Mengembangkan karakter siswa Kurikulum Merdeka SMK tidak hanya fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter siswa. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkebinekaan global, dan berwawasan kebangsaan dan (4) Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Kurikulum Merdeka SMK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan pendidikan yang lebih berkualitas dan berpusat pada siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Sekolah Menengan Kejuruan 3 Kota Serang yang telah mengizinkan penelitian disana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Rektor Universitas Bina Bangsa Prof. Dr. Ir. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M. yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk turut aktif dalam memberikan semangat kepada Dosen-Dosen Bina Bangsa.

REFERENCE

- 1, 2, 3. (2022). 8721, 2105–2118.
- Devi, S., Asbari, M., Insan, U., & Indonesia, P. (2024). *Kurikulum Merdeka yang Memerdekakan Manusia : Perspektif Munif Chatib*. 03(01), 48–52.
- Jojo, A., Sihotang, H., & Indonesia, U. K. (2022). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan)*. 4(4), 5150–5161.
- Kholiq, I. A., & Ulfa, M. (2024). *Implementasi P erencanaan M edia P embelajaran Pada P embelajaran P endidikan A gama I slam Di SMA N eg e ri 2 J akarta*. 152–162.
- Leny, L. (2022). *PROSIDING Vol.1 No.1 2022*. 1(1), 38–49.
- Noviyanti, A. I., Hidayanto, N. E., Sugiarti, R., & Gita, D. (2022). *Analisis implementasi kurikulum merdeka pada fase fondasi*. 6, 8–15.
- Pancasila, P. (n.d.). *No Title*.
- Pembangunan, J. E. (2012). *MENGGUNAKAN MODEL TINDAKAN KOLEKTIF*

KELEMBAGAAN PERTANIAN. 13.

- Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2023). *Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi universitas jambi fakultas hukum.*
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., & Hernawan, A. H. (2022). *Jurnal basicedu. 6(4), 6313–6319.*
- Rambung, O. S., Puang, Y. B., & Salenda, S. (2023). *Transformasi kebijakan pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka belajar. 1(3), 598–612.*
- Saepudin, E. A., Amilia, R., & Wahyiah, I. R. (2023). *Journal of Law Science. 5(4), 182–188.*
- Susilo, J. H., Eliana, A., Putri, E. Y., Fauziah, A. P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bojonegoro, U. (2022). *PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING DAN LEGALITAS. 6(1), 93–110.*
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). *Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. 6(2), 267–285.*
- Wakia, N. (2021). *Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. 11(2), 175–184.*